

ABSTRAK

Pemerintah sebagai penyelanggara negara dengan tujuan untuk mensejahterakan warga negara melakukan berbagai upaya pembangunan negara dengan memberikan bantuan pembinaan dan bantuan modal kepada masyarakat yaitu salah satunya hibah daerah. Salah satu bentuknya yaitu hibah barang berupa ternak yang dimana di dalam hibah daerah untuk mengikat para pihak dilakukan perjanjian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian hibah daerah dan juga cara penyelesaian apabila dalam perjanjian hibah daerah tersebut terjadi wanprestasi.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu adalah suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian hibah daerah antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan kelompok penerima hibah.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian terdapat dalam dua fase yaitu fase pra penyerahan barang hibah dan fase penyerahan barang hibah, dimana dalam pelaksanaan di lapangan sudah dilakukan dengan semestinya, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat ketentuan lain diluar perjanjian menyebabkan perjanjian itu tidak efektif.

Bagi Lembaga terkait perlu diadakannya pengkajian ulang mengenai perjanjian hibah daerah agar terlaksana lebih efektif .

Kata Kunci: Perjanjian Hibah Daerah,Hibah Ternak,Pelaksanaan Perjanjian.

ABSTRACT

The government as the administrator of the state with the aim of improving the welfare of citizens carries out various efforts to develop the country by providing coaching assistance and capital assistance to the community, one of which is regional grants. One form is the grant of goods in the form of livestock, where in the regional grant to bind the parties an agreement is made. This research aims to determine the implementation of the regional grant agreement and also how to resolve it if a default occurs in the regional grant agreement.

The method used is an empirical juridical approach, which is an approach that examines secondary data first and then continues with conducting primary data research in the field regarding the implementation of regional grant agreements between the Central Java Province Livestock and Animal Health Service and groups of grant recipients.

The results of this research can be concluded that in the implementation of the agreement there are two phases, namely the pre-delivery phase of the grant and the delivery phase of the grant, where in the implementation in the field it has been carried out properly, but in the implementation in the field there are still other provisions outside the agreement causing the agreement not to be implemented properly. effective.

For relevant institutions, it is necessary to conduct a review of regional grant agreements so that they can be implemented more effectively.

Keywords: Regional Grant Agreement, Livestock Grant, Agreement Implementation.